

GENDER ALERT #1

KEBUTUHAN KRITIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA

6 Desember 2025

PENDAHULUAN

Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November hingga awal Desember 2025 telah memicu situasi darurat kemanusiaan terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Desember 2025, tercatat sedikitnya 846 orang meninggal dunia, 547 orang masih dinyatakan hilang, 2.700 orang luka-luka, dan lebih dari 290.000 orang mengungsi, dengan total 3,3 juta orang terdampak di 51 kabupaten/kota¹. Skala, kecepatan, dan sebaran geografis dari bencana ini telah menempatkan perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok berisiko lainnya pada tingkat risiko yang semakin tinggi termasuk diantaranya risiko yang membahayakan keselamatan, keterpinggiran, dan ancaman perlindungan.

Temuan dari respons bencana sebelumnya serta laporan awal dari lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan gender—yang saling terkait dengan kerentanan lain seperti disabilitas, usia, dan status sosial ekonomi—sangat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan evakuasi, mengakses bantuan, dan pemulihan diri. Pada kejadian bencana sebelumnya, gangguan terhadap layanan dasar, padatnya lokasi pengungsian, kerusakan infrastruktur, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan, semakin memperburuk risiko kekerasan berbasis gender (KBG), eksploitasi, dan penelantaran.

Gender Alert ini bertujuan memberikan gambaran cepat dan terarah terkait isu-isu perlindungan terhadap perempuan yang paling mendesak dalam situasi krisis saat ini. Dokumen ini menyoroti risiko spesifik serta dampak yang dialami secara khusus oleh perempuan, anak perempuan/remaja putri, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, perempuan lanjut usia, serta kelompok termarginalkan lainnya. Dokumen ini juga mengidentifikasi hambatan operasional yang memberikan dampak tidak proporsional pada kelompok rentan akibat berbagai kerentanan berlapis. Dengan mempertimbangkan perkembangan konteks dan analisis situasi terkini, *Gender Alert* ini juga menyampaikan rekomendasi mengenai aksi prioritas untuk aktor kemanusiaan, pemerintah, serta mitra masyarakat sipil—terutama koordinator klaster dan para anggotanya—untuk memastikan bahwa respons dilakukan secara inklusif, akuntabel, dan aman, serta berlandaskan pada kebutuhan beragam kelompok terdampak yang tidak hanya terbatas pada aspek penyelamatan jiwa.

Dampak Bencana dan Tantangan Tanggap Darurat

- 846 orang meninggal dunia, 547 orang masih dinyatakan hilang, 2.700 orang luka-luka, dan lebih dari 290.000 orang mengungsi, dengan total 3,3 juta orang terdampak di 51 kabupaten/kota
- Tantangan tanggap darurat bencana Sumatera terhadap perlindungan kelompok rentan:
 1. Kerusakan berat pada akses jalan utama termasuk jalan lintas Sumatera telah menyebabkan beberapa wilayah terisolasi sehingga memperlambat secara signifikan pengiriman bantuan dan penyelamatan jiwa
 2. Keterbatasan akses listrik, serta gangguan jaringan seluler dan internet, semakin memperburuk keterisolasian penyintas dan korban dari akses kebutuhan dasar
 3. Skala dan luasnya sebaran geografis bencana juga memberikan tekanan besar pada sumber daya yang tersedia, sehingga membutuhkan kapasitas logistik, tenaga, dan operasional dalam jumlah besar untuk menjangkau populasi terdampak
 4. Penilaian cepat terhadap populasi terdampak terhambat oleh keterbatasan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas (SADD), yang berdampak pada terbatasnya kemampuan responden untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan

GAMBARAN SITUASI

Satu minggu setelah bencana terjadi, Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa langkah penting dalam tanggap darurat. Pertama, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga untuk memprioritaskan penanganan darurat serta memastikan mobilisasi sumber daya nasional—termasuk logistik dan pendanaan—untuk mendukung provinsi-provinsi yang terdampak². Kedua, Pemerintah telah mengaktifkan Klaster Logistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) untuk memperlancar distribusi logistik. Ketiga, penanganan darurat selama minggu pertama berfokus pada

¹ Dasbor Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat <https://gis.bnpb.go.id/BANSORSUMATERA2025/>

² Menko PMK: Presiden Instruksikan Bencana Sumatera Diperlakukan Sebagai Prioritas Nasional. <https://www.kompas.tv/nasional/635072/menko-pmk-presiden-instruksikan-bencana-sumatera-diperlakukan-sebagai-prioritas-nasional>

pencarian dan penyelamatan, distribusi bantuan esensial, serta pemulihan akses transportasi dan komunikasi.

Koordinasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah juga telah dilaksanakan secara intensif. Hal ini mencakup koordinasi melalui mekanisme Klaster Nasional, termasuk Sub-Klaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (PP KBG) yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan UNFPA, serta *Indonesia Humanitarian Coordination Platform* (IHCP), forum multi-pihak yang mendukung kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan awal. Sub-klaster PP KBG sendiri telah mengidentifikasi jumlah laporan dan layanan terkait KBG di wilayah terdampak. Informasi ini dapat diakses melalui tautan berikut: https://bit.ly/KIE_pencegahan_penanganan_KBGSumatera

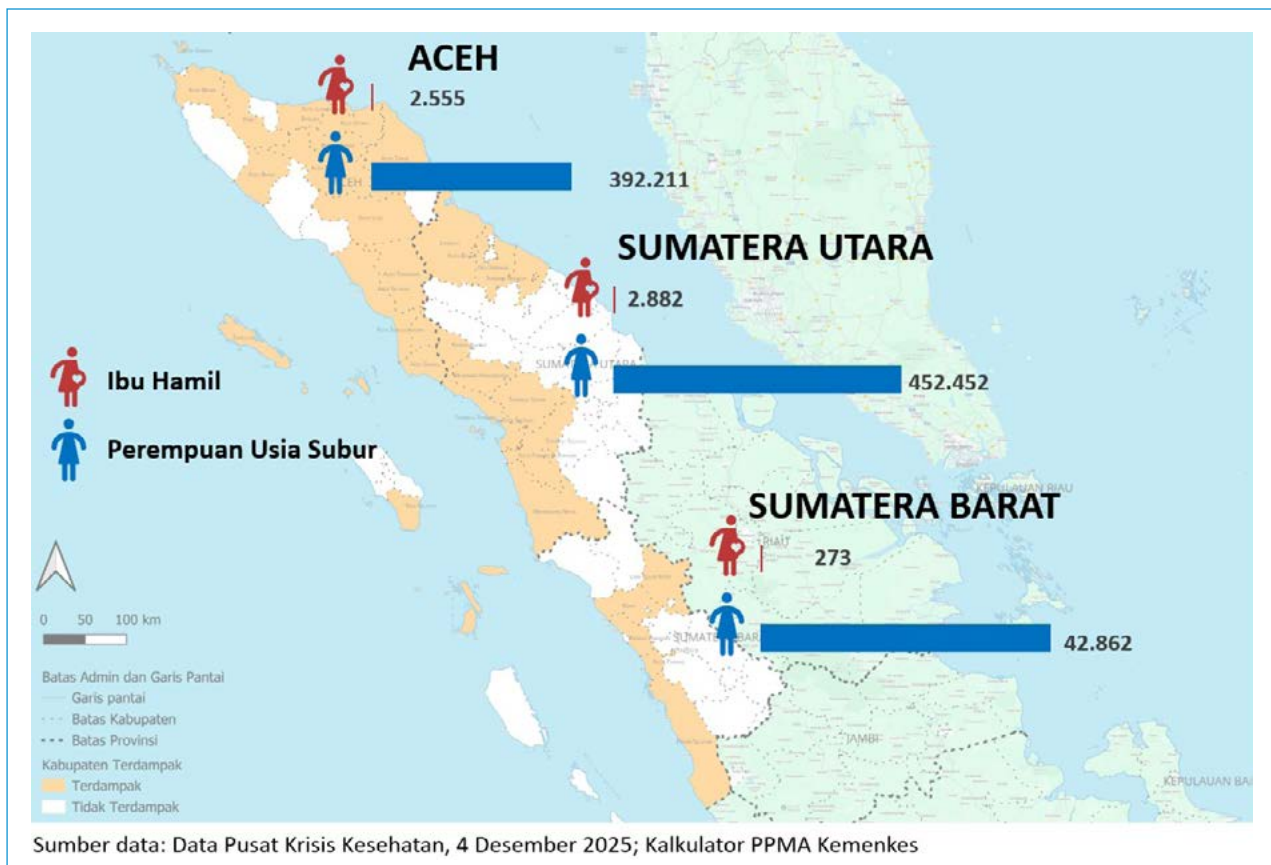
Selama tanggap darurat seminggu terakhir, sejumlah tantangan yang signifikan telah muncul. Kerusakan berat pada akses jalan utama termasuk jalan lintas Sumatera telah menyebabkan beberapa wilayah terisolasi, sehingga memperlambat secara signifikan pengiriman bantuan penyelamatan jiwa kepada mereka yang paling membutuhkan sekaligus menghambat rantai pasok dan mobilitas masyarakat. Keterbatasan akses listrik, serta gangguan jaringan seluler dan internet, semakin memperburuk keterisolasian penyintas dan korban dari akses kebutuhan dasar. Skala dan luasnya sebaran geografis bencana juga memberikan tekanan besar pada sumber daya yang tersedia, sehingga membutuhkan kapasitas logistik, tenaga, dan operasional dalam jumlah besar untuk menjangkau populasi terdampak. Selain itu, penilaian cepat terhadap populasi terdampak terhambat oleh keterbatasan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, penyintas dengan penyakit menahun, penyintas dengan komorbid, penyakit menular (SADDD), yang berdampak pada terbatasnya kemampuan responden untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan.

ANALISIS KEBUTUHAN

Keterbatasan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, penyintas dengan komorbid, penyakit menahun dan penyakit menular (SADDD) dalam proses assessmen kebutuhan yang sedang berlangsung telah menjadi hambatan dalam memastikan respons yang efektif dan sesuai kebutuhan yang beragam kelompok terdampak. Hingga pelaporan *Gender Alert* ini dilakukan, kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan individu dengan kebutuhan khusus belum tertangani secara optimal karena absennya data terpilah yang diharapkan mampu mengidentifikasi jenis kebutuhan, lokasi, serta jumlah kebutuhan secara akurat.

Kementerian/Lembaga saat ini tengah mengembangkan sejumlah inisiatif yang terkoordinasi untuk memperkuat basis data dan bukti guna meningkatkan perencanaan tanggap darurat. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dengan dukungan UN Women dan UNFPA, sedang mempersiapkan asesmen cepat yang mengintegrasikan SADDD dan audit keselamatan berbasis risiko KBG untuk mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda, risiko perlindungan, dan kesenjangan layanan yang dialami perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok penyintas dengan penyakit menahun, penyintas dengan komorbid dan penyakit menular.

Sebagai respons terhadap ketiadaan data terpilah yang lengkap, estimasi awal populasi terdampak di tiga provinsi telah dihitung menggunakan Kalkulator Perhitungan Estimasi Minimal Layanan untuk Populasi Terdampak dan Kelompok Rentan milik Kementerian Kesehatan³. Dikembangkan melalui kemitraan antara Kementerian Kesehatan (KEMENKES) dan UNFPA, estimasi ini menggunakan data resmi BNPB yang tercantum dalam Dashboard Tanggap Darurat Sumatera³ sebagai sumber data utama. Estimasi ini memberikan proyeksi awal kebutuhan populasi.



3 Dasbor Respons Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat <https://gis.bnpb.go.id/BANSORSUMATERA2025/>

Proyeksi sementara ini berfungsi sebagai panduan penting untuk perencanaan respons awal dan prioritas layanan esensial bagi kelompok rentan disaat kaji cepat dengan data terpilah masih berlangsung.

Melihat dari respons tanggap darurat sebelumnya di Indonesia, termasuk Tsunami Aceh tahun 2004 menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak mengalami dampak secara tidak proporsional akibat bencana. BNPB (2019) melaporkan bahwa 60–70 persen penyintas bencana adalah perempuan dimana perempuan serta anak-anak menghadapi tingkat kematian hingga 14 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pola ini menegaskan bahwa bencana tidak bersifat netral gender. Dalam tanggap darurat yang sedang berlangsung di Sumatera, data awal dan laporan dari lapangan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perempuan dan kelompok rentan lain yang memerlukan tindakan segera:

1. Akses terhadap Kebutuhan Dasar dan Kebutuhan Spesifik

Kendala logistik saat ini—termasuk kerusakan jalur transportasi, terganggunya rantai pasok, dan keterbatasan akses ke lokasi terpencil—secara signifikan menghambat distribusi layanan esensial. Per 3 Desember 2025, BNPB melaporkan adanya 266 wilayah terisolasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat⁴. Akses yang terputus, terutama di desa terpencil atau terisolasi mengakibatkan banyak kelompok rentan masih belum terjangkau, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelamatan jiwa, layanan kesehatan, layanan ibu dan anak, perlindungan, serta dukungan psikososial.

Bantuan kemanusiaan awal yang berfokus pada makanan dan barang bantuan non-pangan belum menjawab kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta individu yang membutuhkan bantuan medis khusus. Meskipun distribusi bantuan pemerintah berupa 500.000 ton logistik, makanan, obat-obatan, tenda, dan selimuts⁵ sedang berlangsung, penyediaan barang bantuan non-pangan yang responsif gender—termasuk bahan kebutuhan kebersihan menstruasi dan komoditas kesehatan reproduksi—belum dipertimbangkan. Ketiadaan penyediaan kebutuhan spesifik ini akan meningkatkan risiko kesehatan bagi kelompok rentan. Dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, kelompok rentan dan termarginalkan berisiko semakin tertinggal.

2. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Tempat Pengungsian

Data BNPB mencatat bahwa 2.144.200 orang mengungsi akibat bencana ini⁶. Selama rapat koordinasi Sub-Klaster Pencegahan dan Penanganan KBG, ketiga pemerintah provinsi melaporkan bahwa pengungsi tinggal di tempat penampungan sementara, di mana perempuan, laki-laki, dan keluarga ditempatkan tanpa ruang aman yang memadai, termasuk ruang privasi yang sangat dibutuhkan oleh perempuan, remaja perempuan, dan ibu menyusui.

Kondisi ini secara signifikan meningkatkan risiko KBG, yang mencakup tindakan berbahaya (fisik, seksual, emosional) yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan yang berakar pada perbedaan konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan⁷. KBG dalam konteks bencana telah muncul dalam berbagai bentuk; kegagalan memberikan perlindungan kepada

kelompok rentan akan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi dan pelecehan seksual, perkawinan anak dan paksa, serta perdagangan orang.

3. Kebutuhan Lintas Sektor

Assesmen kebutuhan yang sedang berlangsung yang memungkinkan semakin banyak nya informasi yang terkumpul termasuk data terpilah dan analisis gender lanjutan mengenai dampak, kebutuhan sekaligus rekomendasi tanggap darurat untuk banjir Sumatera akan dimasukkan dalam edisi *Gender Alert* berikutnya yang akan diterbitkan minggu depan.

KESENJANGAN DAN PRIORITAS PERLINDUNGAN DALAM KEADAAN DARURAT

Penyediaan Data Terpilah dan Peta Respons 3W (*Who does What, Where—siapa melakukan apa dan di mana*) untuk Menginformasikan Respons Kemanusiaan yang Inklusif, Tepat Sasaran, dan Efektif

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, kelompok penyintas dengan penyakit menahun, penyintas dengan komorbid, dan penyakit menular (SADDD) menjadi landasan penting untuk memahami kebutuhan dan risiko berbeda yang dialami populasi terdampak. Dalam keadaan krisis, SADDD sangat penting untuk mengidentifikasi kelompok rentan, merancang intervensi yang tepat sasaran dan responsif gender, serta memastikan bantuan kemanusiaan berjalan secara inklusif dan setara. SADDD yang kuat memungkinkan advokasi yang lebih efektif terkait isu prioritas—termasuk pencegahan KBG, layanan perlindungan, dan keterlibatan bermakna organisasi perempuan dalam respons darurat. Dengan demikian, SADDD merupakan alat penting untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas aksi kemanusiaan.

BNPB telah mengembangkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat; namun platform ini belum mengintegrasikan data terpilah, karena asesmen—termasuk *safety audit dan Rapid Gender Assessment*—masih berlangsung. BNPB, dengan dukungan UN Women dan UNFPA, sebelumnya telah mendokumentasikan praktik baik penggunaan SADDD di empat respons darurat besar: erupsi Semeru 2021–2022, gempa Pasaman Barat 2022, gempa Cianjur 2022, dan erupsi Lewotobi Laki-Laki 2024. Pengalaman ini memberikan panduan praktis untuk memperkuat integrasi SADDD dalam respons Sumatera. Berdasarkan pembelajaran tersebut, integrasi SADDD ke dalam Dashboard Operasi Darurat BNPB untuk Sumatera akan dilaksanakan melalui kemitraan BNPB bersama UN Women dan UNFPA. Rekomendasi kunci dari laporan terkini termasuk:

- Memastikan pengumpulan SADDD secara konsisten di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi sebagai dasar penetapan target;
- Memanfaatkan alat digital hemat biaya seperti KoboCollect dan Google Forms untuk memfasilitasi pengumpulan dan analisis data yang cepat dan efisien;
- Menyederhanakan kuesioner dan variabel survei guna meningkatkan kualitas data dan mengurangi beban tim lapangan; dan
- Memastikan ketersediaan enumerator terlatih dalam jumlah memadai untuk cakupan lokasi pengungsian dan menjaga kualitas data selama operasi darurat (BNPB, 2025)

Penguatan kerangka SADDD ini akan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis bukti dan memungkinkan respons

4 Daftar Lengkap 266 Wilayah Terisolir di Aceh, Sumbang, Sumut akibat Banjir, Tanah Longsor, <https://www.tribunnews.com/regional/7762571/daftar-lengkap-266-wilayah-terisolir-di-aceh-sumbang-sumut-akibat-banjir-tanah-longsor>

5 Pemerintah Pacu Pemulihan Sumatera: Listrik, Telekomunikasi, dan Logistik Diperbaiki dalam Waktu Singkat, <https://setkab.go.id/percepatan-distribusi-bantuan-bencana-sumatra/>

6 BNPB Catat Pengungsi Bencana Sumatera Lebih dari 2,1 Juta Jiwa, Terbanyak di Aceh, <https://aceh.inews.id/berita/bnpb-catat-pengungsi-bencana-sumatera-lebih-dari-21-juta-jiwa-terbanyak-di-aceh>

7 Women's Freedom of Violence, <https://wrw.unwomen.org/practice/topics/freedom-violence>

kemanusiaan yang lebih responsif, inklusif, dan sensitif gender di Sumatera.

Pembentukan Ruang Aman untuk Pencegahan KBG

Dalam mencegah peningkatan risiko KBG, terutama di lokasi pengungsian yang belum memenuhi standar karena keterbatasan ruang dan infrastruktur, langkah-langkah proaktif untuk mengurangi paparan risiko serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme perlindungan perlu segera dilakukan. Ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan berperan penting sebagai lingkungan terlindungi dan rahasia, tempat perempuan dan anak dapat memperoleh informasi, dukungan psikososial, dan mengikuti kegiatan pemberdayaan. Namun, ketersediaan ruang aman saat ini masih terbatas sehingga kapasitas pelayanan komprehensif belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan layanan pencegahan dan penanganan KBG berbasis penyintas perlu segera dilakukan, termasuk layanan kesehatan reproduksi, manajemen kasus, dukungan psikososial, serta dukungan material seperti paket martabat atau *dignity kits*⁸.

REKOMENDASI

Mengingat asesmen kebutuhan pada fase pertama saat ini, analisis awal telah mengidentifikasi tindakan mendesak untuk memastikan respons kemanusiaan yang sensitif gender. Analisis lanjutan akan dimasukkan dalam edisi berikutnya dengan merinci rekomendasi atas prioritas kebutuhan dan pendekatan mengenai bagaimana, dimana, dan kepada siapa bantuan harus diberikan.

1 Perkuat Respons Evakuasi, Bantuan, dan Penargetan yang Responsif Gender

- Pastikan langkah prioritas bagi individu dan rumah tangga rentan selama distribusi awal bantuan non-pangan; kelompok seperti ibu hamil/menyusui, remaja perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga kepala keluarga perempuan harus menjadi prioritas.
- Identifikasi kebutuhan perempuan dan anak perempuan dari wilayah terpencil (pegunungan dan pesisir) karena kondisi geografis, keterbatasan layanan, dan gangguan komunikasi meningkatkan risiko ketahanan pangan, kesehatan, dan isolasi.
- Mulai pemetaan dan penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti *dignity kits*, kebutuhan kebersihan menstruasi, pasokan nutrisi bayi, dan alat bantu disabilitas sebagai bagian dari respons awal.

2 Pulihkan dan Lindungi Layanan Kesehatan, Perlindungan, dan KBG

- Pengerahan tim kesehatan dan perlindungan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan maternal, perawatan bayi baru lahir, dukungan inklusif disabilitas, dan dukungan psikososial.
- Aktivasi dan bangun jalur rujukan KBG termasuk mekanisme pelaporan rahasia di tempat pengungsian.
- Sediakan penerangan, pembatas privasi, fasilitas WASH terpisah, dan tempat tidur aman di tempat pengungsian.
- Pulihkan layanan kesehatan reproduksi dan antenatal secara prioritas dengan jangkauan kepada ibu hamil dan menyusui.
- Kerahkan tenaga perlindungan khusus untuk mengidentifikasi dan mendukung kelompok termarjinalkan.

3 Pastikan WASH, Shelter, dan Tempat Pengungsian Inklusif Gender dan Disabilitas

- Desain tempat pengungsian dan ruang komunal agar mencerminkan kebutuhan perempuan dan pengasuh, termasuk ruang menyusui dan area mandi/cuci yang aman.
- Sediakan fasilitas WASH yang aksesibel (ramp, pegangan tangan, toilet adaptif) serta air yang memadai untuk kebersihan menstruasi dan perawatan bayi.
- Libatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan lokasi, manajemen shelter, dan mekanisme umpan balik.

4 Perkuat Koordinasi Kemanusiaan dan Akuntabilitas kepada Penyintas

- Integrasikan spesialis gender dalam Pusat Operasi Darurat dan rapat klaster tingkat provinsi/kabupaten.
- Sediakan mekanisme umpan balik real-time (WhatsApp, posko bantuan, focal point komunitas) yang dapat diakses perempuan, remaja perempuan, dan penyandang disabilitas.
- Pastikan komunikasi terbuka terkait hak bantuan untuk mengurangi risiko eksklusi dan eksploitasi.

5 Atasi Hambatan *Livelihood*, Ketahanan Pangan, dan Pemulihan

- Sediakan bantuan tunai yang disesuaikan bagi rumah tangga kepala perempuan, penyandang disabilitas, pekerja informal, dan pengasuh.
- Dukung pemulihan awal (usaha mikro, pertanian, kerja rumah berbasis komunitas) dengan pendekatan sensitif gender dan inklusif disabilitas.
- Pastikan distribusi pangan mencakup kebutuhan nutrisi bayi, ibu hamil/menyusui, dan lansia.

6 Cegah dan Tanggapi Risiko Pelindungan Termasuk Eksploitasi dan Pelecehan Seksual

- Pelatihan terhadap seluruh responden (pemerintah, militer, relawan, NGO) mengenai Pelindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA).
- Pendistribusian materi komunikasi tentang *Do's and Don'ts* bagi responden kemanusiaan di ruang publik terdampak.
- Pembentukan saluran pelaporan PSEA secara jelas di shelter dan titik distribusi.

7 Perkuat Kepemimpinan Perempuan dan Partisipasi Komunitas

- Libatkan kelompok perempuan, organisasi penyandang disabilitas, kelompok pemuda, dan kader kesehatan lokal dalam manajemen Hunian Sementara (Huntara), asesmen, dan perencanaan pemulihan.
- Akui dan dukung mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang dipimpin perempuan, termasuk yang memobilisasi jaringan perawatan informal.
- Alokasikan dana mikro (*micro-grants*) yang fleksibel dan terlindungi bagi Organisasi Perempuan (WLOs) dan Organisasi Hak-Hak Perempuan (WROs) untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan layanan kesehatan reproduksi bergerak (*SRH mobile services*).
- Berikan akses kepada perwakilan WLO/WRO dalam pertemuan dalam platform multipihak dan pengambilan

8 Gender Alert #2 'No Excuse: Calling for An End to Gender Based Violence in Sudan', <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/12/gender-alert-no-excuse-calling-for-an-end-to-gender-based-violence-in-sudan>

keputusan di Pusat Operasi Darurat (EOC) tingkat provinsi/kabupaten serta rapat koordinasi klaster untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan partisipasi komunitas.

8 Integrasikan Perspektif Gender dalam Tindakan Antisipatif dan Perencanaan Pemulihan Awal

- Dokumentasikan pembelajaran dari gap yang teridentifikasi pada sistem peringatan dini dan integrasikan protokol antisipatif yang mempertimbangkan mobilitas gender dan beban pengasuhan.
- Prioritaskan perencanaan pemulihan pascabencana yang inklusif gender untuk mencegah reproduksi ketidaksetaraan dalam sistem dan infrastruktur baru.

Apa itu Gender Alerts?

Gender Alert ini bertujuan memberikan gambaran cepat dan terarah terkait isu-isu perlindungan terhadap perempuan yang paling mendesak dalam situasi krisis saat ini dengan menyediakan informasi mengenai:

1. Risiko spesifik serta dampak yang dialami secara khusus oleh perempuan, anak perempuan/remaja putri, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, perempuan lanjut usia, serta kelompok termarjinalkan lainnya
2. Rekomendasi mengenai aksi prioritas untuk aktor kemanusiaan, pemerintah, serta mitra masyarakat sipil—terutama koordinator klaster dan para anggotanya—untuk memastikan bahwa respons dilakukan secara inklusif, akuntabel, dan aman



Daftar Istilah

Gender

Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan perbedaan biologis tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas serta merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PerMen PPA) No 13 tahun 2021)

Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan yang disebabkan perbedaan gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran (PerMen PPA No 8 tahun 2024)

PSEAH (Prevention of Sexual Exploitation and Harassment)

Pencegahan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual, adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Indonesia Humanitarian Coordination Platform

Forum multipihak yang mendukung kesiapsiagaan, respons darurat dan pemulihan awal

Sex, Age, Disability Disaggregated Data (SADDD)

Data yang dipilah ke dalam beberapa kategori tertentu seperti jenis kelamin, umur dan disabilitas dengan tujuan untuk memperlihatkan perbedaan dan ketidakadilan yang dihadapi kelompok populasi yang berbeda (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Women's Rights Organizations/Organisasi Hak Perempuan

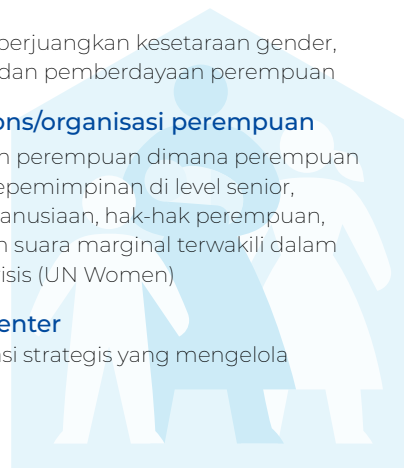
Lembaga yang bekerja memperjuangkan kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan dan pemberdayaan perempuan

Women's Led Organizations/organisasi perempuan

Organisasi yang dipimpin oleh perempuan dimana perempuan memegang 50% atau lebih kepemimpinan di level senior, yang berfokus pada misi kemanusiaan, hak-hak perempuan, bina damai guna memastikan suara marginal terwakili dalam pembangunan dan respon krisis (UN Women)

Emergency Operations Center

Pusat komando dan koordinasi strategis yang mengelola respons darurat



Narahubung

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak deputiphp.asdeprtr@gmail.com
- UN OCHA moektijasih@un.org
- UN Women annisa.srikandini@unwomen.org
- Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia mpbi.sekretariat@gmail.com